

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali, *Hukum Kepegawaian*, 1986, CV. Rajawali, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dimock, Marshal Edward dan Gladys Ogden Dimock, 1986, *Administrasi Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Sri, dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marbun, SF dkk, 2001, *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Satoto, Sukamto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Simamora, Henry, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Syamsudin, M, 2008, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Tayubnapis, Burhannudin A., 1995, *Administrasi Kepegawaian Daerah Suatu Tinjauan Analitik*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1983, *Administrasi Kepegawaian Daerah*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Triatmodjo, Sudibyo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Veithzal, Rivai, 2004, *Personnel Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainun, Buchari, 1995, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Republik Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Skripsi:

- Febri Kartika Sari, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) (Studi Di Kantor DPRD Lombok Barat Dan Sekretariat Daerah Lombok Barat)*, Fakultas Hukum: Universitas Mataram.
- Ida Ayu Putri Wulandari, 2018, *Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian (PPPK) Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5*

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Fakultas Hukum:
Universitas Udayana.

Jurnal:

Artika, Rike Anggun, “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Review Terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 06, No. 01 2015, Fakultas FISIP Universitas Garut.

Fajar, Salni, “Tradisi Pesantren: Antara Tradisionalis Dan Modernis (Studi Kasus Implikasi Kepemimpinan Kiai Pesantren Di Sumatera Selatan)”, *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 19, No. 2 Desember 2018, Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 32 No. 2 Desember 2016, Justisia Ex Pax.

Jati, Wasisto Raharjo, “Analisa Status, Kedudukan, Dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Dalam UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 11, No. 1 April 2015, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Maruapey, M. Husein, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII, No. 1 Juni 2017.

Suhendra, Dedy, “Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No. 2 Agustus 2017, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Internet:

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019, pada pukul 10.00.

<http://anen9.blogspot.com/2016/03/pengertian-kedudukan-atau-status-sosial>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pada pukul 05.20.

<https://www.gadjian.com/blog/2018/03/16/perbedaan-jaminan-hari-tua-dan-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pada pukul 16.10.

Lainnya:

Wawancara dengan Mokhamad Mudiyanto, S. AP, tanggal 6 Mei 2019 di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKDD) Kabupaten Banyumas.

Wawancara dengan Menik Nur Utami, S.H, tanggal 13 Mei 2019 di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKDD) Kabupaten Banyumas.